

PENGEMBANGAN DIGITAL *GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Di DESA PONTANG

Juliannes Cadith¹, Rina Yulianti^{2*}, Andi Moch Janurina³

j.cadith@untirta.ac.id, rina.yulianti@untirta.ac.id, amjanuriana@untirta.ac.id

^{1,2} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³ Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

* Rina Yulianti : rina.yulianti@untirta.ac.id

Abstrak.

Pengembangan *Digital Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan. Masyarakat sudah terbiasa dengan media internet, dikarenakan selama masa covid-19, pemerintah melakukan pelayanan public secara online, begitu juga dengan informasi yang dilakukan melalui media internet. Sehingga membuat semua organisasi pemerintahan dan masyarakat terutama di desa menjadi terbiasa di dalam penggunaan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan Desa Pontang yang memiliki kelebihan atau potensi yang bisa di gali lebih jauh dan dapat menjadi salah satu masuakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti, salah satu hal yang penting adalah keinginan masyarakat mendapatkan informasi layanan dengan cepat melalui media online. Oleh Karen itu peneliti ingin membuat sebuah program atau aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, selain itu aparat desa juga dapat menyimpan data desa di aplikasi tersebut. Sehingga tata kelola desa yang baik dalam *digital governance* ini dapat berjalan.

Kata Kunci: Digitalisasi, *e-government*, pelatihan

Abstrac

Development of Digital Governance in Village Governance is urgently needed. The community is used to internet media, because during the Covid-19 period, the government carried out public services online, as well as information provided through internet media. So that all government and community organizations, especially in villages, become accustomed to using applications provided by the local government. Likewise with Pontang Village which has advantages or potential that can be explored further and can be one of the inputs in improving people's welfare. The results of research that has been done by researchers, one of the important things is the desire of the community to get service information quickly through online media. Because of that, researchers want to make a program or application that can make it easier for the community to get information, besides that village officials can also store village data in the application. So that good village governance in digital governance can work.

Keywords: Digitalization, e-government, training

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu wujud tanggungjawab akademik suatu institusi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat menambah wawasan dan menghasilkan sesuatu yang dapat membantu masyarakat. Sebelumnya peneliti melakukan penelitian terkait keterbukaan informasi publik di Desa Pontang Kabupaten Serang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Pontang belum dilakukan secara sistematis, serta belum terintegrasi secara mudah diakses bagi yang membutuhkannya. Dalam memperbaiki

kondisi tersebut sangat dibutuhkan sistem informasi manajemen yang baik dalam pemenuhan hak akan informasi masyarakat secara cepat, tepat dan akurat yang handal. Selain itu sistem informasi yang handal akan sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan. Kinerja pembangunan akan semakin berkualitas apabila di dukung oleh informasi dan data yang akurat serta dapat diakses dengan mudah. Proses pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, pelaporan serta evaluasi dan diseminasi, maka hasilnya akan semakin berkualitas. Disisi lain pelayanan pemerintah desa

kepada masyarakat akan semakin baik, cepat dan akurat dengan sistem informasi manajemen yang handal.

Pemerintah Desa/kelurahan merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan, permasalahan serta potensi akan lebih akurat teridentifikasi dan lebih mudah dicarikan solusinya serta kreativitas dalam pemanfaatan potensi akan semakin terbuka dan optimal melihat posisi strategis serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, membuka peluang yang besar bagi desa-desa yang ada untuk bisa mengembangkan potensi yang ada serta mengarahkan sumber daya desa untuk mengatasi permasalahan – permasalahan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan langkah yang strategis dalam menjalankan roda pemerintahan desa. *Digital Governance* dalam pemerintahan desa tidak hanya berbicara tentang website sebuah desa, tapi merupakan sistem terintegrasi dari semua proses bisnis dari pemerintah desa mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi pembangunan serta media untuk meningkatkan kualitas semua jenis pelayanan pemerintah desa. Sehingga mampu menghadirkan pemerintah desa yang bekinerja tinggi, transparan dan akuntabel seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Dukungan teknologi informasi dalam pemerintahan desa akan mendorong integrasi data sehingga sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan – keputusan pembangunan. Tentu saja perubahan bisnis proses yang terjadi ini harus diikuti dengan perubahan kompetensi, disiplin dan kebiasaan aparatur serta masyarakat desa. Pengembangan digital governance menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah perubahan kebiasaan – kebiasaan baru di masyarakat yang dipercepat dengan adanya wabah covid yang melanda seluruh dunia. Dimana interaksi antara pemerintah dan seluruh stakeholder yang semula menggunakan media konvensional beralih menggunakan teknologi informasi, tentu saja kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT.

Tujuan dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurut Djoko Agung Harijadi, Sesditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo RI dalam rangka memberikan layanan kepada publik secara cepat, mudah, dan murah diperlukan tata cara atau mekanisme memperoleh informasi publik antara lain dengan :

- a. Membuat layanan web online (website), yang berisi layanan publik dan semua

informasi publik terkait pemerintahan desa yang dapat diakses oleh masyarakat.

- b. Membangun database informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Membuat sistem atau aplikasi yang mendukung ketersediaan informasi publik

Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti merasa perlu membantu desa dalam pengembangan Sistem Informasi pembangunan berbasis IT yang di bagi dalam 4 tahap pengembangan yaitu a. Tahap persiapan; b. Tahap penerapan; c. Tahap pematangan, d. Tahap pemantapan dan tahapan sosialisasi serta evaluasi pemanfaatan, yang pada akhirnya mampu menopang kinerja pemerintah desa dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang semakin efektif, efisien transparan serta akuntabel.

2. Metode Penelitian

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan sistem informasi pembangunan berbasis IT akan dibagi dalam dua tahap yang pertama pengembangan Sistem informasi dan yang kedua tahapan Sosialisasi pemanfaatan serta evaluasi hasil. Dalam tahapan pengembangan sistem informasi pembangunan diawali dengan identifikasi proses bisnis pembangunan dan pelayanan pemerintah desa yang dilakukan secara *brainstorming* yang melibatkan semua aparat desa serta BKD, setelah teridentifikasi proses bisnis, data – data yang di butuhkan serta layanan – layanan yang di berikan maka akan dibuat prototype Sistem informasi pembangunan melalui tahapan tahapan persiapan, tahapan penerapan, tahapan pematangan serta tahapan pemantapan. Setelah program selesai di uji cobakan maka proses selanjutnya adalah tahapan sosialisasi dan evaluasi yang akan dilakukan dalam bentuk workshop bagi kepala desa dan perangkat desa dimana mereka yang akan menjalankan program Teknologi informasi komunikasi yang akan diberikan ke masyarakat. Sehingga akan memudahkan dalam pemberian layanan public ke masyarakat.

Workshop ini menggunakan Pendekatan Bimbingan Teknis (Bimtek), kegiatan dilakukan dengan metode ceramah terkait Pengembangan workshop *Digital Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, Tanya jawab, dan praktek menggunakan pemograman untuk layanan publik, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peserta workshop diberikan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan teknologi di dalam memudahkan layanan public
2. Peserta diberikan pelatihan dalam penggunaan program layanan kepada masyarakat
3. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang diberikan jika ada yang belum jelas.

Peserta workshop dapat melakukan kegiatan ini secara mandiri agar dapat terus terlatih dalam penggunaan program yang sudah ada.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Persiapan

Pada Tahap pertama, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melaksanakan survey ke desa Pontang, dengan bertemu langsung ke kepala desa dan aparatur desanya. Dimana tim pengabdian melakukan pemetaan kebutuhan di desa tersebut. Maraknya digitalisasi saat ini tentu membuat desa butuh akan layanan cepat yang berbasis digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Selanjutnya Tim pengabdian membuat rancangan dengan kepala desa dengan format Forum Grup Discussion (FGD). FGD ini selain Tim Pengabdian dan Kepala Desa pontang, mengundang juga Ahli IT Bapak Taufik yang membuat program layanan berbasis digital, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna yang ada di Desa Pontang. Kegiatan FGD dan sosialisasi yang dilakukan di Desa Pontang mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para peserta. Peserta mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga ketika masuk ke dalam sesi Tanya jawab dan diskusi banyak pertanyaan dari pesertan seputaar bagaimana cara mereka untuk mendapatkan kemudahan di dalam mengurus dokumen di kantor desa melalui online tanpa harus datang ke kantor desa.

FGD dan sosialisasi ini dilakukan agar aparatur desa dan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kegunaan dari program yang diberikan oleh narasumber.



Gambar 1. Penyampaian Program kepada Kepala Desa dan Aparatur Desa Pontang.

B. Tahap Penerapan

Kegiatan FGD dan sosialisasi yang dilakukan di Desa Pontang mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para peserta. Peserta mendengarkan dengan baik apa

yang disampaikan oleh narasumber, sehingga ketika masuk ke dalam sesi Tanya jawab dan diskusi banyak pertanyaan dari pesertan seputaar bagaimana cara mereka untuk mendapatkan kemudahan di dalam mengurus dokumen di kantor desa melalui online tanpa harus datang ke kantor desa. FGD dan sosialisasi ini dilakukan agar aparatur desa dan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kegunaan dari program yang diberikan oleh narasumber.



Gambar 2. Sosialisasi Program Kepada Peserta (RT, RW dan Karang Taruna)



Gambar 3. Pengembangan kapasitas Aparatur Desa untuk Menunjang Digitalisasi pelayanan Desa

C. Tahap Pematangan

Pada tahap ini, Tim pengabdian dan aparatur desa melakukan kegiatan pendataan penduduk, agar data yang sudah ada dimasukkan ke dalam program layanan yang sudah kita buat. Karena jumlah masyarakat desa

yang cukup banyak, dalam memasukkan semua data aparatur desa dibantu oleh tim enumerator dari tim pengabdian. Selain data desa juga memasukkan jenis layanan apa saja yang akan digunakan atau yang sering digunakan oleh masyarakat. Jika semua data sudah masuk dan jenis layanan apasaja yang dibutuhkan ke dalam sistem, maka akan memudahkan kantor desa untuk memberikan layanan.



Gambar 4; Tim Pengabdian dan Aparatur Pelayanan Publik Desa Pontang

Implementasi system: adalah suatu proses penerapan aplikasi berbasis *e-government* yang telah dibuat, di uji coba dan dilakukan pelatihan Bersama aparat Desa Pontang.

Adapun Tahapan **Implementasi** di bagi kedalam tahapan sebagai berikut :

- a. Input data dasar, dimana pada tahapan melibatkan Aparatur desa pontang serta mahasiswa pendamping. Proses input data dasar ini memakan waktu hampir satu bulan. Pada tahapan ini di bentuk tim penginput berdasarkan RW yang terdiri dari aparatur desa dan mahasiswa pendamping.pada tahap awal sudah berhasilkan di kumpulkan data 800 penduduk sedangkan yang berhasil di koversi kesistem baru 230 data hal ini terkait dengan kelengkapan data yang dibutuhkan.
- b. Pelatihan Aplikasi Desa Pontang
Setelah dilakukan input data data yang dibutuhkan dalam menjalankan Aplikasi ini maka kemudian dilakukan Pelatihan untuk Aparatur desa. Pelatihan untuk aparatur desa dilakukan secara bersama dan juga

langsung dilakukan penginputan data penduduk secara sistem.

D. Tahap pematapan dan tahapan sosialisasi serta evaluasi pemanfaatan

Tim melakukan kegiatan sosialisasi/workshop terakhir untuk aparatur desa dan masyarakat yang diwakili oleh (Ketua RW, Ketua RT dan Karang Taruna, Ibu PKK) untuk menyampaikan bahwa program layanan public desa sudah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya masyarakat sudah dapat membuat surat/form yang dibutuhkan dari rumah dengan menggunakan HP tanpa harus ke kantor desa,

IV. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi menuntut dan memaksa pelaksanaan pemerintahan di desa mengubah pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi . Selama ini pemerintahan desa melakukan pelayanan public secara manual dan belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data. Oleh karenanya interaksi dan sinergi yang efektif dan optimal sangat diperlukan, hal ini hanya dimungkinkan dengan diterapkannya *e-Governance* secara optimal. Pemerintahan Desa Pontang sangat terbuka akan adanya kemajuan teknologi, sehingga memudahkan di dalam menjelaskan akan pentingnya layanan cepat melalui program sudah dibuat oleh tim pengabdian. Harapannya dengan adanya program ini masyarakat desa lebih mudah dan cepat di dalam mendapatkan layanan publiknya

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Asrori (2014) Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikabupaten kodus. Jurnal Bina Praja Edisi Juni. 6 (2): 101-106
- Ahmad Farouk,M Yasin dkk, 2015, Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, PATTIRO, Jakarta
- Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, 6(1), 9-21.